

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membandingkan kondisi nyata yang ada dilapangan dengan teori lerevan, pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. **M. Anshari Ramadhan.** (2024). Dengan judul **“Efektivitas Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Sei Rukam 1 Dan Desa Tamunti)”**. STIA Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, dan faktor yang mempengaruhi program ASLUT di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian Efektivitas Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong belum efektif dari 8 aspek indikator terdapat 6 aspek yang tidak efektif yaitu aspek target sasaran penerima, aspek ketepatan waktu, aspek bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan, aspek sumber daya manusia, aspek monitoring dan aspek evaluasi. Faktor pendorong dapat dilihat dari: *pertama*, aspek perubahan lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berharap bantuan orang lain. *Kedua*, aspek kepuasan, lansia merasa sangat terbantu sehingga mengurangi beban keluarga. Faktor penghambat yaitu: kurangnya

sosialisasi yang dilakukan dan sumber daya manusia. Saran yang diberikan adalah perlunya dilakukan sosialisasi yang lebih sering dan secara merata sehingga semua bisa terjangkau, pihak desa diharapkan lebih selektif dalam mengajukan lansia yang pantas menjadi penerima program ASLUT, pencairan dana lebih baik dilakukan secara manual saja yang dibagikan melalui fasilitator yang akan mendatangi kesetiap rumah penerima dengan membawa tanda terima dana sebagai bukti bahwa dana benar-benar sudah diberikan.

2. **Muhammad Akbar. (2022). Dengan judul “Menakar Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bidang Lanjut Usia”. Universitas Binawan Jakarta.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lanjut usia merupakan tahap akhir pada siklus kehidupan manusia dimana ditandai oleh penurunan kapabilitas fungsional dan keseimbangan fungsi fisiologis. Masalah yang dialami lansia pada umumnya adalah penurunan fungsi kognitif, penurunan kemampuan fungsional yakni ketergantungan rawat diri dan instrumental, kedisabilitas, kekerasan, depresi, demensia, gangguan konsep diri, rasa kesepian, kemiskinan dan keterlantaran. Selain itu masalah lainnya yang dialami lansia yakni tindak kekerasan. Eksploitasi dan permasalahan hukum. Rentang tahun 2020-2021 menjadi titik awal perkembangan kebijakan kesejahteraan sosial khususnya program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, dimana menjadi prioritas nasional dengan terget sasaran 60.000 lanjut usia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan lanjut usia dengan menggunakan berbagai pendekatan kontemporer, salah

satunya melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Atensi hadir bagi lanjut usia diusung dengan skema yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya bersama keluarganya, serta dapat mengatasi permasalahan kehidupannya. Adapun hasil yang didapatkan arah kebijakan ATENSI LU, yaitu penjaminan hak dasar pemerlu layanan, penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi, prinsip layanan yang holistik, layanan responsif balai/loka, percepatan sumber daya manusia pekerja sosial yang unggul, peran penting pelibatan, dan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang dicapai. Efektivitas merupakan unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan jika ingin mencapai tujuan, ketepatan kita dalam mencapai tujuan merupakan efektivitas, semakin efektif artinya tujuan yang dicapai semakin mendekati kebenaran, sebaliknya semakin tidak efektif artinya semakin baik.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien. Meskipun sebenarnya ada perbedaan yang sangat tegas di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Termasuk efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua tema yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektivitas terdapat beberapa pendapat.

Menurut Steers dalam (Edy Sutrisno, 2017:123), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia, dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia ditempat kerja.

Menurut Prasetyo Budi Saksono dalam (Sattar, 2021:47). Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kedekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Berdasarkan Bernard dalam bukunya (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2021:96). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang ditemukan sebelumnya.

Efektivitas ditujukan untuk sasaran organisasi sesuai dengan waktu yang telah di tentuka, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningarat dalam bukunya (Monica Feronica Bormasa, 2022:133) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan.

Efektivitas menurut Siagian dalam bukunya (Aswar Annas, 2017:74) adalah pemanfaatan sumber daya, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tindaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Mullins dalam (Djuang Fajar Sodikin, 2020:41-42) dalam buku Pendekatan Berbasis Program melihat efektivitas sebagai rasio keluaran terhadap tujuan sasaran, atau tugas tertentu, sementara European Commission menndefinisikannya sebagai sejauh mana hasil

program berkontribusi untuk mencapai tujuannya. Namun Van Dooren et al mendefinisikan efektivitas sebagai rasio output terhadap hasil rasio input terhadap hasil adalah efektivitas biaya.

Definisi efektivitas dari European Commission tersebut di atas terlihat lebih logis karena fokus utamanya adalah pada hasilnya. Oleh karena itu fokus pada rasio yang diusulkan oleh Mullins kurang dapat diterapkan. Demikian pula definisi Van Dooren et al, yang juga kurang disukai karena tidak mengaitkan efektivitas dengan tujuan sebagai tolok ukur program atau organisasi. Oleh karena itu istilah efektivitas dalam buku ini didefinisikan sebagai sejauh mana hasil program berkontribusi untuk mencapai tujuan terkait.

Efektivitas dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (1990), dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa hasil. Menurut Emerson dalam (Armida Silvia Asriel, 2018:258) dalam buku Manajemen Kearsipan, mengatakan efektivitas adalah pengukuran mengandung arti tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara siagian, menegaskan bahwa:

“Efektivitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan yang artinya apakah pelaksanaan sesuai dengan tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bila mana tugas itu diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan”.

Menurut Wiestra dalam (Armila Silvia Asriel, 2018:258) dalam buku Manajemen Kearsipan, mengatakan “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”. Menurut Subagyo, efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau memiliki maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997).

Athur G. Gedeian dkk dalam buku Analisis Efektivitas Program Usaha Agribisnis Pedesaan (Puap) Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Pendapatan Petani (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Bina Sejati). Sedangkan menurut (Khairul Rizal, 2020:10) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Dari pengertian tersebut adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi bahwa:

“Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan”.

Kesimpulan dari definisi efektivitas menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana terget tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Teori Efektivitas Program

Efektivitas Menurut Budiani dalam (Asima Yanty Siahaan dan Piki Darma Kristian Pardede, 2022:102-103) dalam buku Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik bahwa Efektivitas program menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program
Mengukur sejauh mana tingkat para peserta dalam pelaksanaan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi Program
Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan Program
Kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Pemantauan Program
Bentuk kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Budiani (2007:20).

c. Pengukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh (S.P Siagian, 2018:31) yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud supaya laryawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjambani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksana kegiatan operasional;
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
- 5) Penyusunan program yang tepat satu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efesian, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesian maka

- organisasi tersebut tidak akan mencapai sasaran, karna dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; dan
- 8) Sistem pengawasan dan pengembalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Champbell J.P dalam (Andi Agiskawati dkk, 2018:2)

terdapat beberapa cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol, yaitu:

- 1) Keberhasilan program
Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dengan proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan;
- 2) Keberhasilan sasaran
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memuaskan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat di ukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan;
- 3) Kepuasan terhadap program
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga;
- 4) Tingkat *input* dan *output*
Pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka tidak dapat dikatakan efisien; dan
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh
Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditentukan.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan efektivitas kerja pegawai berhasil dilakukan dengan baik atau tidak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Menurut Relly dalam (Faizurah ahmad, 2014:36-37) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi yaitu:

- 1) Waktu
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit;
- 2) Tugas
Bawahan harus diberikan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada pegawainya;
- 3) Produktivitas
Seorang pegawai mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya;
- 4) Motivasi
Pimpinan dapat mendorong pegawainya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara sensitif, semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan;
- 5) Evaluasi Kerja
Pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada pegawainya, sebaliknya pegawai harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan untuk dievaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak;

- 6) Pengawasan
Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksana tugas;
- 7) Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai sewaktu bekerja; dan
- 8) Perlengkapan dan Fasilitas
Adalah suatu sarana dan peralatan yang di sediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran pegawai dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh pemerintah akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Menurut (Tadi Aryadi, 2020:14) Secara Psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampilnya dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih muda mencapai kinerja yang diharapkan.

Menurut (Deddy Mulyadi, 2018:19) setiap kegiatan yang dilakukan secara sadar dan selalu mempunyai tujuan. Demikian juga dengan perubahan organisasi, tujuan perubahan organisasi antara lain:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan aktivitas.
- 2) Meningkatkan kemampuan organisasi.
- 3) Mengadakan penyesuaian-penyesuaian.
- 4) Mengendalikan suasana kerja dan meningkatkan peran.

Sedangkan Menurut (Richard M Steers, 2020:209) G. Menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas suatu program, yakni sebagai berikut:

- 1) Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- 2) Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencairan dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

2. Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian Rehabilitasi Sosial

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (Nama Baik) yang semula perbaikan anggota tubuh yang cacat dan yang lainnya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban kecelakaan) agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki posisi di masyarakat. Rehabilitasi merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam

kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan (Husmiati, 2020:13).

Menurut (Kardani dan Sudirman, 2014:240) rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu “re” yang artinya “kembali” dan “habilitas” yang berarti kemampuan. Secara tidak langsung maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan upaya pemulihan yang telah diberikan kepada klien dari gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial, agar dapat melaksanakannya peran tersebut harus kembali secara baik dalam keluarga maupun masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan suatu pelayanan sosial sebagai upaya pemulihan agar seseorang melakukan fungsi sosialnya secara optimal. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan dilembaga sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Suparlan dalam (Nur’aini, Miswanto, Yeni Marito Harahap, 2022:110) mengemukakan bahwa Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya.

Menurut W. Scott Allan dalam (Marbun, 2017:205) rehabilitasi adalah pemulihan seseorang ke adaan semula, dengan pemulihan yang paling sering pada kapasitas fisik atau mentalnya. Sedangkan Menurut *The National Council On Rehabilitation* dalam (Marbun, 2017:205) menyatakan bahwa definisi dari rehabilitasi yang masih digunakan

adalah pemulihan untuk manfaat fisik, mental, sosial, ekonomi, dan vocational dari seluruh kemampuan yang mereka mampu.

Dapat disimpulkan Rehabilitasi pada dasarnya adalah proses pemulihan individu ke keadaan semula, yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, ekonomi, hingga keterampilan (*vocation*). Artinya, Rehabilitasi tidak hanya terbatas pada penyembuhan fisik atau mental, tetapi juga bertujuan mengembalikan fungsi dan kemampuan individu secara menyeluruh agar dapat berperan kembali secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Rehabilitasi Sosial memiliki tujuan, fungsi dan jenis yaitu:

1) Tujuan Rehabilitasi Sosial

Departemen Sosial 2015 mengatakan bahwa tujuan dari rehabilitasi sosial adalah kemandirian pada setiap individu yang mengalami kelainan sehingga dapat menghilangkan ketergantungan individu terhadap orang lain. Tujuan rehabilitasi sosial penyembuhan secara fisik juga dilakukan penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh seperti menyiapkan individu atau klien agar mampu untuk melaksanakan kegiatan baik secara penuh maupun tidak penuh, serta mengembalikan kepercayaan pada diri sendiri. Dengan begitu program rehabilitasi ditujukan agar individu atau lanjut usia memperoleh kemandirian baik secara fisik, mental, psikologis, dan sosial. Sehingga nantinya terdapat keseimbangan di antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Hal tersebut dapat menghilangkan sikap ketergantungan terhadap orang lain, untuk

mencapai semua ini diperlukan program rehabilitasi yang dilakukan secara komprehensif.

2) Fungsi Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.07/HUK/KBP/II/1984 tentang pola dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial, dikatakan bahwa fungsi rehabilitasi sosial merupakan suatu proses refungsional dan pengembangan agar memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu untuk melaksanakan fungsi sosialnya didalam kehidupan masyarakat.

3) Jenis Rehabilitasi Sosial

Jenis Rehabilitasi Sosial memiliki beberapa layanan utama yang ditujukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka yaitu:

a) Penyandang Disabilitas

Ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan alat, serta dukungan pendidikan dan pekerjaan.

b) Lanjut Usia

Khusus untuk masyarakat lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sosial. Serangkaian kegiatan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, baik

secara individu maupun kelompok, dengan fokus pada pemenuhan hak dasar dan peningkatan fungsi sosial.

c) Anak Terlantar

Fokus pada anak-anak dan remaja yang mengalami masalah sosial, seperti anak jalanan, anak yatim, anak putus sekolah, atau anak dengan perilaku menyimpang. Program ini meliputi pendidikan, bimbingan, keterampilan, konseling psikososial, dan pembinaan.

d) Tuna Sosial

Seorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, kurban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan permasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.

e) Korban Penyalahgunaan NAPZA

Bertujuan untuk Proses pemulihan terpadu yang memulihkan fungsi sosial korban, mengembalikan mereka ke kehidupan masyarakat, dan mencegah kekambuhan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti motivasi, konseling, bimbingan sosial, dan bimbingan resosialisasi, yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

f) Korban Tindak Kekerasan, Trafficking, dan Eksploitasi

Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang atau bentuk eksploitasi lainnya, sehingga fungsi sosialnya terganggu.

g) Korban Bencana

Individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dampak psikologis akibat suatu peristiwa bencana (baik alam maupun sosial), yang kemudian menjadi sasaran pelayanan sosial untuk memulihkan fungsi sosial dan kemampuan mereka untuk kembali hidup secara normal dan mandiri.

b. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Asistensi memiliki arti kegiatan mengasistensi atau membantu seseorang dalam tugas profesionalnya (KBBI). Sedangkan Asistensi Rehabilitasi Sosial memiliki arti kegiatan pendampingan untuk membantu pemulihan dan pengembangan seseorang yang mengalami permasalahan sosial. Asistensi sosial juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang

bertujuan memberi bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, termasuk didalamnya bantuan secara umum atau bantuan yang diberikan untuk orang-orang miskin, dan lain sebagainya.

c. Tujuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Penyelenggara Asistensi bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, memenuhi tugas, dan peran sosial, serta menghadapi masalah kehidupan. Tujuan dari Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia untuk:

- 1) Memberikan pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan bagi lanjut usia, keluarga, komunitas atau LKS lanjut usia;
- 2) Memberikan perlindungan kepada lanjut usia;
- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial lanjut usia;
- 4) Menjangkau lanjut usia dan keluarga lanjut usia yang mengalami masalah sosial;
- 5) Menjangkau lanjut usia dan lingkungan sosialnya.

d. Sasaran Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Sasaran utama Asistensi Lanjut Usia adalah yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tidak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta lanjut usia yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Dalam pelaksanaannya, program ini ditujukan kepada tiga sasaran yaitu:

1) Sasaran Keluarga

Sasaran keluarga adalah keluarga kandung lanjut usia, seperti anak, cucu, dan kakak/adik kandung lanjut usia, apabila lanjut usia tidak memiliki keluarga kandung lagi, maka orang-orang di sekitar lanjut usia seperti tetangga, ketua lingkungan setempat atau tokoh masyarakat setempat bisa menjadi keluarga pengganti. Hal ini berarti sasaran layanan bisa ditujukan kepada keluarga kandung dan keluarga pengganti sebagai tempat lanjut usia mendapat perawatan, perhatian dan kasih sayang.

2) Sasaran Komunitas

Sasaran komunitas adalah kelompok khusus yang ada dan tinggal di sekitar lanjut usia, komunitas di antaranya LKS Lanjut Usia/Pusat Santunan Keluarga, dan berbagai jenis organisasi yang dibentuk masyarakat untuk memberi perhatian khusus kepada lanjut usia.

3) Sasaran Residensial

Sasaran residensial adalah pelayanan berbasis residensial yang merupakan alternatif terakhir setelah pelayanan berbasis komunitas dan keluarga. Layanan residensial melalui Balai atau Loka Rehabilitasi Sosial, panti Rehabilitasi Sosial PUSAKA atau LKS menjadi kebutuhan bagi lanjut usia yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga yang tidak mampu merawat lanjut usia karena permasalahan ekonomi dan sosial. Perawatan residensial di Balai Loka Panti atau LKS dapat menjamin kualitas kesejahteraan sosial lanjut usia bagi terpenuhinya

kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial lanjut usia yang dilaksanakan secara temporer.

e. Komponen Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Ada Enam Komponen layanan yang diberikan melalui Program Asistensi Lanjut Usia, yaitu:

1) Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak

Komponen pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi lanjut usia merupakan komponen yang paling vital untuk menjamin kehidupan mereka. Adapun jenis kebutuhan hidup layak bagi lanjut usia mencakup kebutuhan sadang/pakaian; kebutuhan pangan/makanan, atau nutrisi; kebutuhan papan/tempat tinggal; kebutuhan kesehatan; kebutuhan interaksi dengan orang lain; kebutuhan kasih sayang; kebutuhan hukum/rasa aman/perlindungan; kebutuhan spiritual; kebutuhan hiburan/rekreasi; kebutuhan apresiasi/pengakuan; kebutuhan pendidikan.

2) Perawatan Sosial

Kegiatan perawatan sosial dilakukan secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, perawatan sosial dapat dilakukan oleh keluarga serumah, tetangga atau pendamping khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam perawatan sosial di antaranya membantu lanjut usia melakukan aktivitas sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari sampai kembali tidur di malam hari. Jenis kegiatan perawatan sosial disesuaikan dengan kondisi lanjut usia dan lingkungannya.

3) Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan pemberian dukungan oleh keluarga terhadap lanjut usia berupa; dukungan emosional, penghargaan/penghormatan, informasi, dan dukungan kelompok untuk memahami masalah yang dihadapi. Kegiatan dukungan keluarga dilakukan melalui perdampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas, serta tanggung jawab sosial keluarga.

4) Terapi Fisik, Psikososial, dan Terapi Mental Spiritual

Terapi merupakan upaya mengoptimalkan fungsi fisik, mental spiritual, psikososial, dan penghidupan bagi lanjut usia berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial. Terapi-terapi ini dimaksudkan supaya lanjut usia memiliki keterampilan sosial yang baik dan percaya diri sehingga mereka merasa diberdayakan.

5) Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial

Merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada lanjut usia agar dapat hidup secara layak.

6) Dukungan Aksesibilitas

Merupakan upaya untuk membantu lanjut usia sehingga memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai jenis layanan dengan menghubungkan sistem sumber sesuai dengan kebutuhan. Dukungan aksesibilitas dilakukan melalui dukungan langsung dan dukungan tidak langsung. Dukungan langsung dilakukan dengan cara sosialisasi, layanan, advokasi sosial, dan fasilitasi, dukungan

tidak langsung dilakukan dengan cara advokasi sosial kepada pemangku kepentingan.

f. Pendekatan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pelaksanaan Program Asistensi Lanjut Usia dilaksanakan oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Pemberian layanan diberikan secara langsung dan tidak langsung yang bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU atau PUSAKA).

Pemberian layanan Asistensi Lanjut Usia menggunakan metode manajemen kasus. Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengukur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan. Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan Asistensi Lanjut Usia dapat diberikan melalui respon kasus.

g. Mekanisme Pelaksana Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Mekanisme pelaksanaan dirancang untuk dapat mengakomodasi kompleksitas kebutuhan pelayanan dalam setiap area program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Untuk itu pelaksanaannya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan penanganan permasalahan lanjut usia dan keluarga di berbagai konteks lingkungannya. Mekanisme Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

1) Identifikasi Akses Layanan

Akses merupakan langkah awal yang menghubungkan antara lanjut usia yang mengalami masalah sosial dengan sistem sumber pelayanan sosial. Adapun tiga sumber akses yaitu:

a) Sumber Akses Rujukan

Proses pelimpahan tanggung jawab penanganan dimana penerima rujukan diharapkan dapat menindak lanjuti pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien meliputi: sumber rujukan sebagai perorangan; sumber rujukan pihak ketiga yang berasal dari kepolisian, rumah sakit, panti sosial, LKS-LU atau PUSAKA (Pusat Santunan Keluarga), dan diantara oleh warga masyarakat; dan sumber akses laporan di antaranya melalui *commant centre*, *hotline*, lanjut usia yang datang sendiri, media *online* dan LKS-LU atau PUSAKA.

b) Sumber Penjangkauan

Sumber penjangkauan (*outreach*) di antaranya pekerja sosial, Tim Reaksi Cepat (TRC), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PKS), dan pendampingan sosial lainnya.

c) Respon Kasus

Khusus penanganan lanjut usia pada situasi darurat diantaranya bencana dan darurat khusus (penelantaran, kekerasan, berhadapan hukum, dsb).

2) Pendekatan Awal dan Kesepakatan Bersama.

Pendekatan awal dan kesempatan bersama dalam asistensi lanjut usia terdiri dari asesmen awal dilakukan dengan verifikasi kasus melalui *home visit*, lembaga, ruang publik. Respon darurat dilakukan oleh *rescue safety*, tenaga medis dan psikologis. Serta kesepakatan awal didapatkan melalui pengisian *inform consent*, persetujuan keluarga atau wali lanjut usia baik yang dilakukan oleh Balai Loka, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, dan LKS LU atau PUSAKA.

3) Asesmen Komprehensif

Asesmen komprehensif adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas (Pekerja Sosial, Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Pendampingan LKSLU atau PUSAKA, atau petugas lain yang diberi amanah) untuk melaksanakan pemahaman dan pendalaman masalah, kebutuhan, potensi dan sumber, jenis bantuan yang telah diterima, dan jenis layanan/bantuan yang dibutuhkan oleh lanjut usia selaku calon penerima Asistensi Lanjut Usia. Hasil asesmen komprehensif tersebut dituangkan dalam laporan hasil asesmen komprehensif dan menjadi dasar pengajuan proposal calon penerima Asistensi Lanjut Usia.

3. Lanjut Usia

a. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia atau menua merupakan suatu proses menjadi tua dimana seseorang berarti telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu

anak, dewasa dan tua yang telah mengalami perubahan baik secara biologis, maupun psikologis. Kemuduran fisik yang terjadi dalam proses menua yaitu seperti kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat dan figur tubuh yang tidak proporsional. Penuaan adalah proses alamiah yang tidak dapat dihindari, berjalan terus menerus, dan berkesinambungan (Pipit Festi W, 2018:6).

Menurut (Hamonangan et al, 2020:2) lanjut usia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, dimana karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lansia. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menggolongkan lansia menjadi 4 yaitu: usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun. Berdasarkan dari beberapa pengertian lansia maka dapat diambil bahwa lansia adalah masa dewasa akhir, yang dimulai pada usia 60-an dan diperluas sampai sekitar 120 tahun, memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam perkembangan manusia lima puluh tahun sampai enam puluh tahun, proses menjadi tua dan

masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, yang pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lanjut usia, lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia salah satu kelompok Penerima Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena memiliki keterbatasan. Jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat seiring kemajuan di bidang kesehatan, yang ditandai dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian. Lanjut usia menghadapi banyak perubahan dan masalah terkait kesejahteraan hidup mereka. Dalam proses penuaan, lanjut usia mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, tindak kekerasan, pelanggaran hukum, sehingga lanjut usia mengalami ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Ciri-ciri Lanjut Usia

Mengenai ciri-ciri lanjut usia menurut Kholifah dalam (Mujiadi dan Siti Rachmah, 2022:3-4) adalah:

- 1) Lanjut usia mengalami periode kemunduran
Kemunduran para lanjut usia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Lanjut usia yang memiliki motivasi rendah maka cenderung mengalami proses kemunduran fisik secara cepat juga, sedangkan lanjut usia yang memiliki motivasi tinggi, kemungkinan kemunduran fisiknya lambat terjadi.
- 2) Lanjut usia memiliki status kelompok
Kondisi ini sebagai akibat dari aspek sosial yang tidak menyenangkan terhadap lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik, misalnya lanjut usia yang lebih senang

mempertahankan pendapatnya maka sikap sosial di masyarakat menjadi negatif, tetapi ada juga lanjut usia yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial masyarakat menjadi positif.

- 3) Menua membutuhkan perubahan peran
Perubahan peran tersebut dilakukan karena lanjut usia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lanjut usia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya sebagai ketua RW, sebaiknya masyarakat tidak memberhentikan lanjut usia sebagai ketua RW karena usianya.
- 4) Penyesuaian yang buruk pada lanjut usia
perlakuan yang buruk terhadap lanjut usia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan. Contohnya : lanjut usia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lanjut usia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.

c. Tipe-tipe Lanjut Usia

Terdapat beberapa tipe lanjut usia antara lain:

- 1) Tipe arif bijaksana
Kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, memenuhi undangan dan menjadi panutan.
- 2) Tipe mandiri
Mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, efektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman dan memenuhi undangan.
- 3) Tipe tidak puas
Konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik dan banyak menuntut.

4) Tipe pasrah

Menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama, dan melakukan pekerjaan apa saja.

5) Tipe bingung

Kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif dan acuh tak acuh.

Beberapa tipe lanjut usia bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial dan ekonominya. Sunaryo et al, dalam (Purba, 2023:88-89)

d. Hak Dasar Lanjut Usia

Hak dasar lanjut usia yang tercantum dalam UUD 1945 Juga merupakan hak lanjut usia. Selain itu, hak lanjut usia termuat dalam UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hak lanjut usia tersebut antara lain untuk mendapatkan:

- 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- 2) Pelayanan kesehatan;
- 3) Pelayanan kesempatan kerja;
- 4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- 5) Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum: layanan publik dengan fasilitas khusus;
- 6) Kemudahan dalam layanan bantuan hukum;
- 7) Perlindungan sosial;
- 8) Bantuan sosial.

C. Kerangka Pemikiran

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah, perlu dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan tersusun secara sistematis. Sebagaimana implikasi pemberlakuan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka kerangka pemikiran yang diajukan sesuai dengan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dengan menggunakan teori Efektivitas dari Budiani dalam (Asima Yanty Siahaan & Piki Darma Kristian Pardede, 2022:102-103). Mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat efektivitas suatu program, sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
Ketepatan sasaran program berguna untuk mengukur peserta program yang tepat. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.
2. Sosialisasi Program
Sosialisasi program mengukur kemampuan penyelenggara dalam melakukan sosialisasi mengenai program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada sasaran program, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
3. Tujuan Program
Tujuan program adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.
4. Pemantauan Program
Pemantauan program mengukur bagaimana program setelah dilaksanakan dan diterapkan oleh regulator sebagai bentuk perhatian kepada para peserta program. pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

